

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Hesser dan Siedersleben (2007) menilai bahwa peran yang dimainkan oleh standardisasi merupakan konsekuensi dari globalisasi. Lingkungan persaingan internasional mengharuskan para profesional untuk memiliki pengetahuan tentang standardisasi juga. Beginilah kebutuhan akan standardisasi pengajaran muncul. Ide serupa diungkapkan oleh Lee (2007, p.17) yang berpendapat bahwa peran standardisasi dan kebutuhan untuk mengetahuinya meningkat sebagai hasil dari "persaingan global yang semakin ketat dan inovasi teknologi yang pesat". De Vries (2015) mengapresiasi bahwa pendidikan standardisasi juga diperlukan bagi para profesional yang bekerja di badan standardisasi nasional atau organisasi internasional lainnya yang terkait dengan standardisasi dan menyoroti pentingnya membangun komunitas para ahli tersebut agar mereka dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai berbagai masalah terkait standardisasi.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia merupakan Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia, termasuk metrologi, standar, pengujian dan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya BSN berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pertahanan, n.d.). Dalam undang-undang tersebut BSN bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, khususnya dalam kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Standardisasi Nasional berupaya untuk mengembangkan pendidikan standardisasi di berbagai jenjang pendidikan formal termasuk tingkat perguruan tinggi dan pendidikan non formal melalui berbagai kegiatan kursus dan pelatihan.

Program Pendidikan Standardisasi merupakan salah satu program di Badan Standardisasi Nasional yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Di sisi lain terdapat regulasi lain yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan yang melahirkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait standar tentang Sertifikasi Profesi juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Karena ketiga regulasi tersebut tidak saling menjadi acuan sehingga dalam penerapan standar, masing-masing Kementerian/Lembaga pelaksana menetapkan standar sendiri-sendiri. Dalam kaitan hubungan antara lembaga tersebut salah satu problem utama standardisasi di Indonesia adalah keragaman data dan kelemahan koordinasi antar-lembaga/kementerian. Keragaman data terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) sejauh ini diatasi dengan data SNI BSN, data sertifikasi profesi diwujudkan dengan data pemegang sertifikasi profesi di BNSP, data terkait Standar Nasional Pendidikan diwujudkan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud. Dari kajian regulasi yang berlaku, Sistem Standardisasi Nasional hingga saat ini belum terbangun dalam suatu regulasi yang utuh dan terintegrasi, sehingga tidak saling terhubung dan berjalan secara individual. Selanjutnya peneliti berfokus pada ruang lingkup program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSNI/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 130, Pusat Pendidikan dan Masyarakat (Pusdikmas) Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta masyarakat di bidang standardisasi dan jaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, Pusdikmas Standardisasi menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat standardisasi dan jaminan mutu; (2) Penyusunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta masyarakat di bidang standardisasi dan jaminan mutu; (3) Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan serta

pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu; (4) Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu; (5) Pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu; (6) Pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu; (7) Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pusdikmas Standardisasi dibantu oleh 2 bidang yang terdiri dari: (a) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi; dan (b) Bidang Pemasyarakatan Standardisasi. Pusdikmas Standardisasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pusdikmas Standardisasi Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdikmas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2015 sampai dengan 2019. Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Renstra Badan Standardisasi Nasional (Pertahanan, n.d.) dan Renstra Kedeputan Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN Tahun 2015-2019 (BSN, 2015). Renstra Pusdikmas Tahun 2015-2019 menjadi dokumen acuan dalam meningkatkan kinerja Pusdikmas untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang terencana, teratur dan terkendali dengan baik sehingga tercapai visi masyarakat yang berorientasi standar. Dengan demikian diharapkan kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui edukasi publik. Untuk pencapaian visi dan misi Pusdikmas dilaksanakan melalui Program Pengembangan Standardisasi Nasional dan kegiatan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja tahunan. Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja di Pusdikmas Standardisasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini belum sepenuhnya berhasil sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kerja Utama (IKU) dan Indikator Kerja Kunci (IKK) dari Pusdikmas Standardisasi BSN.

Sampai dengan tahun 2014 capaian indikator kinerja Pusdikmas

Standardisasi adalah: (1) Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru dan mahasiswa/siswa) mencapai 5.055 orang; (2) Jumlah peserta pelatihan standardisasi (instruktur dan peserta) mencapai 1.131 orang; (3) Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian mencapai 16.961 orang; (4) Jumlah peningkatan partisipasi anggota Masyarakat Standardisasi sampai dengan tahun 2014 mencapai 4.151 orang; (5) Jumlah peserta SNI Award di tahun 2014 mencapai 159 peserta menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 180 peserta; (6) Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi pada tahun 2014 mencapai 79,39. Berdasarkan hasil tersebut, mayoritas capaian indikator kinerja Pusdikmas Standardisasi tahun 2010-2014 melebihi target yang telah ditetapkan. Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru dan mahasiswa/siswa) mengalami peningkatan capaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembelajaran pendidikan standardisasi di 11 perguruan tinggi yang tengah dan telah mengajarkan pendidikan standardisasi. Demikian juga dengan kegiatan sosialisasi standardisasi yang secara berkala dilakukan oleh BSN kepada dunia pendidikan (perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah kejuruan) baik secara aktif mendatangi lembaga pendidikan formal tersebut, maupun menerima kunjungan dari lembaga pendidikan untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Selain dari pada itu, pengembangan sistem *e-learning* sebagai wujud pembelajaran mandiri dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian sangat berkontribusi dalam peningkatan jumlah capaian peserta pendidikan. Demikian juga dengan peserta pelatihan standardisasi yang mengalami kenaikan, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran dan keberhasilan layanan pelatihan standardisasi dalam membangun kompetensi sumber daya manusia, khususnya di tingkat organisasi maupun di lembaga penilaian kesesuaian. Terlebih dengan diberlakukannya registrasi *online* dalam mendukung aplikasi layanan pelatihan, terbukti mempermudah pelanggan pelatihan untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pelatihan, baik untuk pelatihan publik maupun *in house training*. Salah satu fungsi Pusdikmas adalah pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) Diklat. Sampai tahun 2014, IKP Diklat mendapatkan kategori “Baik”, dengan nilai 79,39 (99.24%)

dari target yang diharapkan. Capaian yang telah dilakukan oleh Pusdikmas salah satu tujuannya untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi. Untuk meningkatkan persepsi masyarakat dibutuhkan program promosi, edukasi dan penyadaran masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pengembangan pendidikan standardisasi mulai dari lembaga pendidikan sampai perguruan tinggi, pembuatan kurikulum pelatihan standardisasi, peningkatan partisipasi masyarakat serta mendorong keterlibatan lembaga pelatihan dalam mendidik dan membina tenaga ahli standardisasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak ketiga (perguruan tinggi), tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi masuk kategori sedang dengan nilai 67,67 (target 75). Hasil ini mengindikasikan masih banyak yang harus dilakukan oleh Pusdikmas dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya standardisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin selaku Kepala Pusdikmas BSN, ditemukan bahwa telah dilakukan beberapa upaya dalam meningkatkan penerapan pendidikan standardisasi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam ruang lingkup kerjasama antara BSN dan Universitas, yang meliputi: 1) Pendidikan, pelatihan dan promosi tentang standardisasi, 2) Partisipasi para ahli dalam kegiatan standardisasi, 3) Penelitian tentang standardisasi dan penyebaran hasilnya, 4) Pengembangan kompetensi *laboratory*, dan 5) Pertukaran informasi tentang standardisasi.

Kerjasama Pendidikan Standardisasi Antara BSN and Universitas didukung dengan MoU antara BSN dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan pendidikan Tinggi pada bulan Mei 2012 dan dengan dengan 47 Universitas, diantaranya: a) 19 Universitas telah mengimplementasikan pendidikan standardisasi pada program sarjana, b) 3 Universitas telah mengimplementasikan pendidikan standardisasi pada program master (Trisakti, IPB, Universitas Jember).

Pendidikan standardisasi dibelajarkan melalui: a) Memasukkan dalam program disiplin ilmu yang terkait, misal: Teknik, ICT, Perdagangan Internasional, Manajemen Bisnis, dll, b) Melalui subjek khusus seperti kursus standardisasi (sebagai kursus wajib atau selektif), dan c) Memasukkan dalam kurikulum akademis jurusan, misalnya Program Magister Kualitas dan Standardisasi.

Penerapan Pendidikan Standardisasi pada Program Magister antara lain pada: 1) Universitas Trisakti, melalui Program Magister Manajemen, Konsentrasi: Kualitas dan Standardisasi dengan kurikulum yang mengacu pada Program Master pada Standardisasi, Peraturan Sosial dan Pengembangan Berkelanjutan University of Geneva, Switzerland, 2) Universitas Pertanian Bogor, melalui mata kuliah pilihan pada Program Master, Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, 3) Universitas Jember, melalui mata kuliah pilihan pada Program Magister Manajemen.

Dalam penerapannya ditemukan permasalahan dalam pengembangan pendidikan standardisasi, yaitu di antaranya: 1) Sosialisasi dan implementasi Pendidikan Standardisasi (*Standardization Education*) belum cukup berhasil dilakukan di lingkungan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, sekalipun sudah ada MoU antara BSN dengan Ditjen Belmawa Kemristekdikti dan banyak perguruan tinggi, 2) Walaupun telah menerapkan beragam strategi, Pusdikmas BSN berharap ada sebuah strategi baru yang lebih tepat agar Pendidikan Standardisasi dapat secara masif dan lebih sistematis diterapkan di dunia pendidikan formal maupun nonformal (perguruan tinggi, lembaga pendidikan, kursus dan pelatihan).

Permasalahan tersebut teridentifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1) Perguruan tinggi memiliki otonomi tersendiri dalam menyusun kurikulum pendidikan sehingga hanya perguruan tinggi yang sadar pentingnya pendidikan standardisasi yang memasukkan pendidikan standardisasi ke mata kuliah wajib, menjadikan pendidikan standardisasi sebagai mata kuliah pilihan, dan menyisipkan pendidikan standardisasi di dalam mata kuliah, 2) Pendidikan standardisasi masih belum didefinisikan dengan baik sebagai suatu disiplin ilmu yang mapan dari perspektif teoritis dan akademis, 3) Pendidikan standardisasi belum dianggap sebagai prioritas oleh perguruan tinggi dan dianggap sebagai suatu kepentingan strategis dan substansi untuk menjadi subyek baru dalam kurikulum pendidikan tinggi, 4) Keterbatasan tenaga ahli/profesor/dosen yang tertarik dan mampu mendorong dan mengampu pendidikan standardisasi, 5) Kurangnya bahan ajar yang dikembangkan dalam pendidikan standardisasi.

Fokus penelitian adalah mengevaluasi penerapan suatu Program dari Badan Standardisasi Nasional yang dinamakan Program Pendidikan Standardisasi yang tertuang dalam Renstra BSN 2014-2019 dan 2020-2024. Nama program ini juga digunakan oleh beberapa penelitian yang terangkum dalam *e-book: Sustainable*

*Development, Knowledge and Education About Standardization*. Organisasi yang melaksanakan program ini sejak tahun 2014 adalah Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi BSN yang kemudian pada tahun 2020 mengalami reorganisasi menjadi Pusat Riset dan Pengembangan SDM Standardisasi BSN. Pendidikan Standardisasi diterapkan melalui jalur pendidikan formal (perguruan tinggi, lembaga pendidikan dasar dan menengah), pendidikan nonformal (kursus, pelatihan dan PAUD) serta pendidikan informal (keluarga dan lingkungan).

## **1.2. Pembatasan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka batasan penelitian ini adalah mengkaji tentang model evaluasi program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional pada periode rencana strategis tahun 2014-2019.

## **1.3. Fokus dan Sub Fokus**

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan penelitian di atas, maka penelitian ini dibatasi pada fokus Model Evaluasi Program Pendidikan Standardisasi di Badan Standardisasi Nasional. Dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Landasan perumusan program pendidikan standardisasi meliputi landasan kebijakan, arah dan strategi kebijakan.
2. Perencanaan program pendidikan standardisasi, meliputi sumber daya manusia, relevansi kurikulum, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pelaksanaan program pendidikan standardisasi, meliputi: sosialisasi, pembelajaran, kerjasama, distribusi sumber daya, monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut.
4. Hasil program pendidikan standardisasi, meliputi capaian dan manfaat pendidikan standardisasi.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan perumusan program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional?
2. Bagaimana perencanaan program pendidikan standardisasi di Badan

- Standardisasi Nasional?
3. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional?
  4. Bagaimana hasil penerapan program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan model evaluasi program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional melalui:

1. Evaluasi konteks program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional
2. Evaluasi input program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional
3. Evaluasi proses program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional
4. Evaluasi produk penerapan program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional

### **1.6. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki signifikansi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini menjadi bagian dari suatu proses dalam:

- a. Mengembangkan suatu konsep baru dalam bidang keilmuan evaluasi program pendidikan;
- b. Menambah wawasan dalam bidang keilmuan manajemen mutu pendidikan;
- c. Menambah wawasan dalam bidang keilmuan manajemen pendidikan.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Mewujudkan suatu model evaluasi penerapan program pendidikan standardisasi yang bermanfaat dalam dunia pendidikan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas evaluasi penerapan program pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional;

- c. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

### 1.7. State of The Art

Untuk menunjukkan *state of the art* peneliti melakukan penelusuran literatur dari penelitian yang relevan. Hasil penelusuran tersebut memberi informasi adanya ketidaksinambungan atau *gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya dan peneliti gunakan untuk menentukan posisi penelitian yang menunjukkan kebaruan dari penelitian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Berikut ini hasil penelusuran studi literatur:

<b>Tahun</b>	<b>Nama Penulis dan Jurnal</b>	<b>Metode</b>
2007	Yuliarmi & Riyasa	Pendidikan standardisasi meningkatkan proses pengembangan produk agar semakin berkualitas dan diterima konsumen
2012	Normadewi & Arifin	Strategi dalam implementasi pendidikan standardisasi melalui pendidikan dan pelatihan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap budaya mutu dan produk bertanda SNI
2014	Mahendra	Pendidikan standardisasi sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk bertanda SNI

### 1.8. Novelty

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah suatu inovasi berupa desain model penerapan program pendidikan standardisasi yang akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia.

Selanjutnya sebagai luaran hasil penelitian akan disusun sebuah *handbook* panduan model penerapan pendidikan standardisasi di Badan Standardisasi Nasional.

### 1.9. Roadmap Penelitian

Peta jalan penelitian ini disusun selain untuk peneliti memahami masalah penelitian yang dikaji, juga agar dapat diperoleh pemecahan masalah dengan mengacu pada sub masalah yang lebih rinci. Peta jalan ini mencakup perencanaan,

arah, dan target luaran dari penelitian yang dilakukan. Peta jalan penelitian ini meliputi:

a. Penelitian relevan yang telah dilakukan penulis atau peneliti lain

Penelitian relevan yang dilakukan penulis lain antara lain: Pendidikan standardisasi meningkatkan proses pengembangan produk agar semakin berkualitas dan diterima konsumen. Strategi dalam implementasi pendidikan standardisasi melalui pendidikan dan pelatihan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap budaya mutu dan produk bertanda SNI, dan Pendidikan standardisasi sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk bertanda SNI.

b. Penelitian yang akan dan sedang dilakukan

Penelitian yang akan dan sedang dilakukan penulis adalah Model Evaluasi Program Pendidikan Standardisasi di Badan Standardisasi Nasional.

c. Penelitian berikutnya serta target luaran yang dihasilkan

Rencana penelitian berikutnya adalah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada Program Pendidikan Standardisasi di Badan Standardisasi Nasional, dengan target luaran adanya suatu aplikasi pembelajaran (*Learning Management System*) berbasis daring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengakses program pendidikan standardisasi.

